

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Lembaga keuangan perbankan memiliki peran penting dalam proses kelancaran sistem keuangan. Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam menstabilkan perekonomian di suatu Negara. Bank merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana (*Surplus*) dengan pihak yang kekurangan dana (*deficit*), atau sering disebut sebagai lembaga intermediasi. Bank mempunyai peranan penting sebagai lembaga perantara keuangan dalam perekonomian sebagai jasa keuangan dan sebagai lembaga intermediasi yang berperan aktif sebagai penggerak langsung dalam sektor riil (Maryandi, 2014). Intermediasi ini merupakan fungsi utama dari perbankan, sehingga terganggunya fungsi intermediasi akan sangat mempengaruhi system perekonomian di suatu Negara.

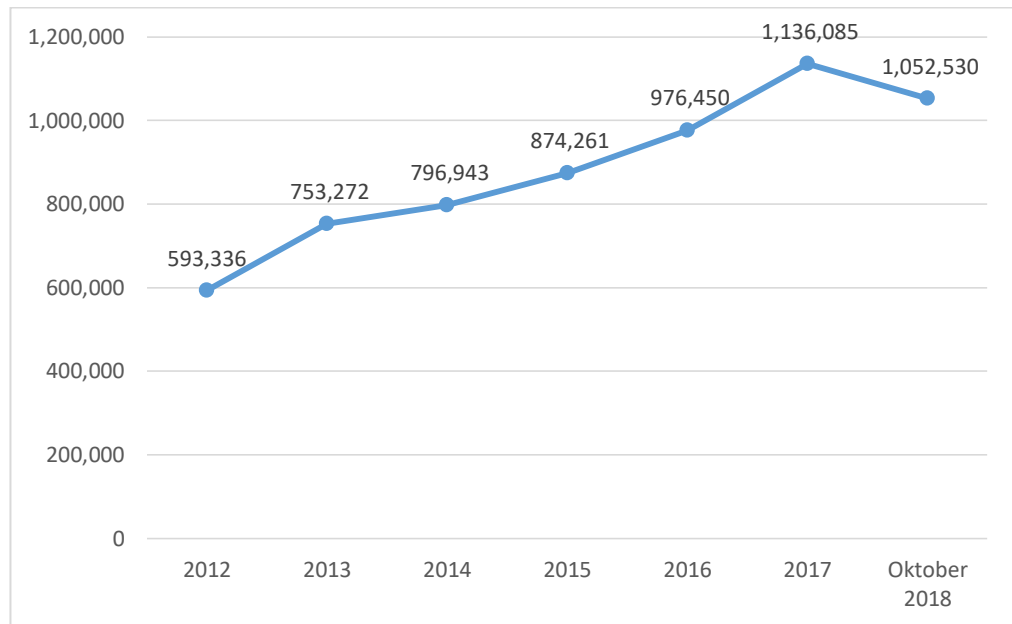
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan yang hanya menerima simpanan berbentuk deposito berjangka dan tidak memberikan pelayanan lalu lintas pembayaran seperti halnya Bank umum. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki definisi yang sama dengan BPR. Akan tetapi proses pelaksanaan BPRS berdasarkan prinsip syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki landasan hukum yang jelas tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.

7 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun

1998. Setelah Pakto 1998 tentang liberalisasi memungkinkannya pendirian Bank selain yang sudah ada dikeluarkan,

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjadi lembaga keuangan syariah pertama yang mendapatkan izin beroperasi. Berdasarkan data statistic perbankan syariah, BPRS memiliki asset sebesar Rp 6,5 Triliun sampai dengan Desember 2014. Secara kelembagaan, jumlah BPRS selalu meningkat di setiap tahunnya. Dilihat dari data OJK bahwa hingga September 2018, BPRS telah memiliki 168 Bank yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan laba rugi gabungan BPRS menyatakan bahwa, total pendapatan BPRS pada tahun 2016 tercatat Rp 976.450 Miliar, dan di tahun 2017 total pendapatan BPRS meningkat menjadi Rp 1.136.085 Miliar. Hal ini membuktikan bahwa kinerja BPRS selalu mengalami peningkatan.

Seperti halnya definisi dari Bank umum, BPRS juga berfungsi sebagai lembaga yang memiliki peran untuk stabilitas keuangan di suatu Negara. Kerentanan ekonomi akan mengganggu dan memberikan resiko pada stabilitas keuangan Negara dan akan memberikan dampak kepada BPRS selaku salah satu pemilik peran tersebut. Ketidakpastian dan kerentanan ekonomi akan mengakibatkan terjadinya potensi ketidak seimbangan system keuangan dan memicu resiko sistemik.



Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah, 2018

**GAMBAR 1.1**  
Total Pendapatan BPRS tahun 2012-Oktober 2018  
(dalam milyar rupiah)

Gambar 1.1 Menjelaskan bahwa pendapatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus menerus mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun 2012 (pasca krisis 2008) hingga tahun 2017 yang membuktikan bahwa BPRS selalu meningkatkan kinerja mereka walaupun setelah krisis di Indonesia pada tahun 2008. Kemudian nilai CAR pada bulan Oktober 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 83,554,000,000,- atau turun menjadi Rp.1,052,530,000,000,-.

Kegiatan penyaluran kredit (*credit channeling*) yang dilakukan oleh Bank kepada masyarakat dapat menunjukkan sangat besarnya kontribusi perbankan dalam perekonomian di Indonesia. Pemberian kredit ke masyarakat oleh Bank maupun Bank perkreditan rakyat dari tahun ke

tahun mengalami peningkatan nilai sehingga penyaluran kredit ini dapat membantu kemampuan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi. Peran perbankan sebagai penyalur kredit kepada masyarakat membuat perbankan rentan terhadap resiko yang ditimbulkan akibat penyaluran dana tersebut. Secara spesifik, resiko tersebut disebut sebagai resiko kredit.

Risiko kredit bersumber dari adanya potensi bahwa kredit yang diberikan oleh bank tidak dapat dibayar kembali oleh peminjam, Bank akan mengalami kerugian akibat pinjaman yang diberikannya pada kondisi tersebut. Ketika krisis menimpa Indonesia, kondisi perekonomian Indonesia mengalami penurunan drastis dan semakin memburuk sejalan dengan menurunnya kualitas kredit di perbankan. Pada akhirnya, kondisi tersebut mengakibatkan banyaknya bank mengalami permasalahan likuiditas dan permasalahan-permasalahan keuangan lainnya (kajian Stabilitas Keuangan BI, berbagai tahun).

Briguglio (1992, 1993) memelopori penelitian terkait wilayah yang rawan untuk terkena kerentanan ekonomi akibat guncangan (*Shock*) yang mampu mempengaruhi performa negara, penelitian tersebut berdasarkan perspektif yang menekankan pada risiko dalam pembangunan ekonomi. Briguglio juga menjelaskan bahwa kerentanan ini berasal dari guncangan eksogen, guncangan eksogen tersebut berasal dari sejumlah fitur ekonomi, termasuk tingkat keterbukaan ekonomi yang tinggi, ketergantungan pada ekspor yang jumlahnya terbatas, dan ketergantungan pada impor strategis (Briguglio, May 2008).

Kerentanan ekonomi merupakan suatu kajian terhadap aspek spesifik yang menjadi kelemahan negara yang bisa meningkatkan ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi dan kinerja negara, terutama yang berdampak pada pendapatan per kapita negara tersebut (Cordina, 2004). Kerentanan ekonomi merupakan kerentanan suatu negara ketika terjadinya krisis finansial. Krisis finansial ini nantinya akan memberikan dampak terhadap outcome, dimana akan terjadi perubahan besar dan penataan ulang terhadap pasar (apabila dilihat dari sudut pandang makroekonomi) (Seth dan Ragab, 2012).

Sedangkan menurut Intan Apriadi dalam Jurnal manajemen 2017 mengatakan bahwa kerentanan ekonomi merupakan kondisi kinerja ekonomi melemah dan mengalami penurunan yang diakibatkan oleh fluktuasi dari harga asset keuangan. Sehingga dalam perbankan, salah satu tugas utamanya sebagai fungsi intermediasi akan mengalami hambatan yang cukup serius. Dalam ekonomi, konsep kerentanan sendiri sering di terapkan dalam berbagai bidang kepentingan seperti halnya kemiskinan, ketahanan pangan, asset kerentanan, dan pembangunan berkelanjutan. Paling sering, kerentanan dianalisis dalam studi dinamika kemiskinan, dengan fokus pada “risiko jatuh ke dalam kemiskinan atau lebih dalam kemiskinan” (Moret, 2014).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kerentanan ekonomi sangat berdampak terhadap suatu lembaga perbankan. Dalam dua dekade teakhir ini Indonesia sudah dua kali diterpa krisis ekonomi besar. Pertama, krisis keuangan asia yang muncul sekitar tahun 1997 dan mencapai

klimaksnya pada pertengahan tahun 1993, dan kedua, krisis ekonomi global yang terjadi dan mempengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia, selama periode 2008-2009. Sebagai contoh, sedikitnya ada 16 Bank yang di likuidsasi ketika terjadinya krisis ekonomi moneter 1997 di Indonesia. Penutupan 16 Bank itu menimbulkan kerugian yang cukup besar untuk Bank Indonesia. BI harus menyediakan dana talangan yang disebut dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 1,6 triliun yang digunakan untuk mengembalikan dana pada deposan. Penutupan Bank ini di latar belakang karena pada saat itu Bunga bank meningkat sangat tajam kurang lebih sebesar 30% lebih (Apriadi, Sembel, Perdana, & Firdaus, 2017).

Perbankan syariah merupakan salah satu insitusi yang memiliki kerentanan untuk terdampak resiko sistemik. Resiko sistemik sendiri merupakan adanya potensi instabilitas yang dikabitkan adanya gangguan menular pada system ekonomi. Kerentanan perbankan syariah terhadap resiko sitemik disebabkan karena perbankan syariah memiliki dominasi dalam pangsa asset lembaga keuangan syariah secara nasional. Permasalahan perbankan syariah ini disebabkan oleh munculnya *shock* dan *vulnerability*. Resiko sistemik akan muncul apabila shock memiliki interaksi terhadap vulnerability dan tidak dibarengi dengan memadainya tingkat ketahanan (resilience) (Bank Indonesia, 2016).

Perekonomian di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa pada tahun 2008 sangat bergejolak, sehingga menyebabkan perekonomian

dunia saat itu menjadi sangat tidak stabil. Kondisi tersebut menyebabkan krisis ekonomi yang berdampak terhadap perekonomian negara berkembang. Dampak krisis ekonomi yang sangat besar bagi negara-negara yang perekonomiannya bergantung pada negara-negara maju yang mengalami krisis. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ketergantungan perekonomian suatu negara rentan mengalami krisis ekonomi. Karena ketika bergantung terhadap negara yang sedang mengalami krisis ekonomi maka akan berdampak juga kepada negara tersebut.

Krisis ekonomi mengakibatkan resiko sistemik yang membuat ketidakstabilan perekonomian. Ketidaksatabilan perekonomian pada saat itu dapat dilihat dari timpangnya neraca keuangan, menurunnya GDP. Risiko sistemik merupakan suatu kondisi dimana adanya potensi ketidakstabilan yang terjadi akibat gangguan yang menular pada sebagian maupun keseluruhan sistem keuangan karena adanya hubungan interaksi pada faktor ukuran (*size*), kompleksitas usaha (*complexity*), keterkaitan antar institusi dan/atau pasar keuangan (*interconnectedness*), serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian (*procyclicality*) (Bank Indonesia, 2018).

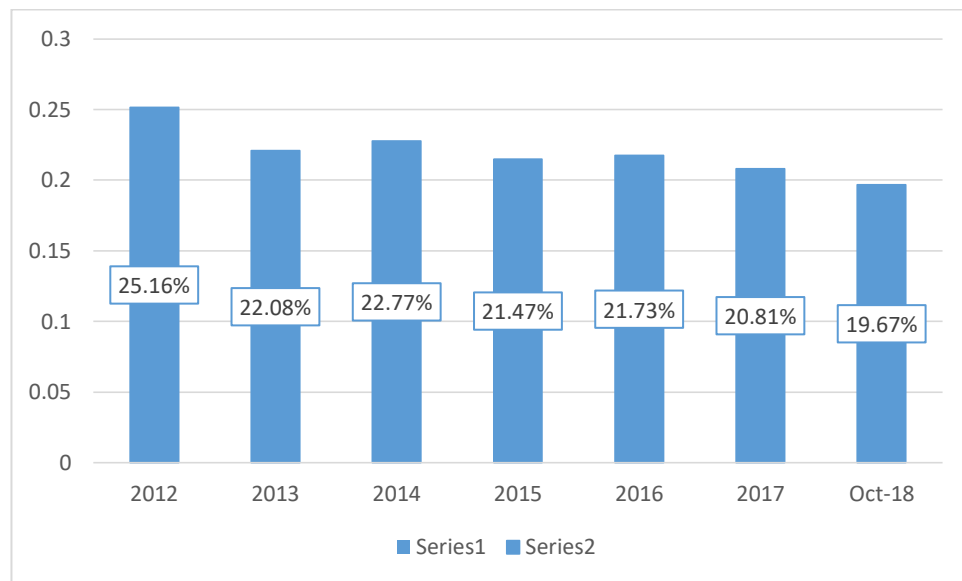
Faktor-faktor yang mempengaruhi krisis pada perbankan menurut Hardy dan Pazarbasioglu (1999), Hadad, Santoso, dan Arianto (2003) dengan menerapkan metoda logit pada persamaan yang dibentuk dari beberapa indikator sektor riil, sektor perbankan, dan variabel shocks.



Variabel-variabel independen yang digunakan terbagi kedalam tiga kelompok besar, yaitu:

1. Variabel sektor riil dalam rangka menjelaskan tingkat efisiensi penggunaan kredit perbankan dan perubahan repayment capacity;
2. Variabel sektor perbankan dalam rangka menjelaskan tingkat ketahanan perbankan terhadap perubahan-perubahan yang signifikan baik pada sisi assets maupun liabilities
3. Variabel shocks yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor lain yang secara langsung maupun tidak langsung (melalui sektor riil) akan mempengaruhi kondisi perbankan.

Kerentanan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat diartikan sebagai potensi BPRS menerima resiko, sehingga kerentanan BPRS dapat dilihat dengan mengukur nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit (aset) yang berisiko. Begitupun sebaliknya, semakin rendah nilai CAR semakin buruk kemampuan bank untuk menanggung resiko, maka semakin tinggi tingkat kerentanan pada BPRS. Pada periode pasca krisis 2008 hingga tahun 2018, BPRS terus mengalami kerentanan yang ditandai dengan nilai rasio CAR yang setiap tahunnya mengalami penurunan.



Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah

### GAMBAR 1.2

Persentasi nilai CAR pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tahun 2012 - Oktober 2018.

Pada gambar 1.2 dapat dilihat bahwa nilai CAR pasca krisis 2008 pada tahun 2012 masih tergolong besar yaitu sebesar 25,16% menunjukkan bahwa BPRS tidak banyak terpengaruhi oleh krisis global tahun 2008. Nilai CAR pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 22,08% dan kembali mengalami peningkatan ditahun selanjutnya. Nilai CAR terus berfluktuasi hingga pada tahun 2016 turun menjadi 21,73%. Setelah tahun 2016, nilai CAR terus mengalami penurunan hingga Oktober 2018 yang disebabkan tidak terjadinya peningkatan Modal pada BPRS dalam jangka waktu tersebut. .

Pada penelitian ini ada beberapa faktor yang di duga mempengaruhi nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu *Return On Asset* (ROA), *Financing Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF),

dan BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional). Pemilihan variable ini disesuaikan kepada landasan konsep yang berdasarkan penelitian yang terdahulu yang pernah dilakukan.

*Return On Asset* (ROA) dalam penelitian Niode, dkk (2018) dan penelitian Andini dan Yunita (2015) menyatakan bahwa *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Shingjergji serta Hyseni (2015) yang menyatakan bahwa *Return On Asset* (ROA) berpengaruh tidak signifikan terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Kemampuan BPRS dalam menghasilkan keuntungan dalam dilihat dengan menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA). Hubungan antara ROA dan CAR positif karena ketika ROA mengalami peningkatan maka akan diikuti dengan laba yang meningkat, sehingga modal juga mengalami peningkatan dan dapat diartikan bahwa rasio CAR juga meningkat (Artin, 2006).

*Financing Deposit Ratio* (FDR) pada penelitian Sujana dkk (2015) dan Wilara dan Basuki (2015) menyatakan bahwa *Financing Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga kesehatan BPRS adalah likuiditas. Dalam perbankan syariah tingkat likuiditas dapat dilihat dari *Financing Deposit Ratio* (FDR). Hubungan FDR dengan CAR yaitu saat FDR tinggi yang disebabkan pembiayaan tinggi sedangkan dana yang dihimpun sedikit dapat menyebabkan CAR menurun (dengan asumsi CAR digunakan untuk menutupi kekurangan dana tersebut).

*Non Performing Financing* (NPF) pada penelitian Andhika dan Suprayogi (2017) serta Andini dan Yunita (2015) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Masood dan Ansari (2016) yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Nilai NPF yang tinggi akan merugikan BPRS karena pada akhirnya akan mengurangi modal yang dimiliki oleh BPRS. Peningkatan nilai NPF akan meningkatkan jumlah Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) yang akhirnya akan berdampak pada modal yang semakin tergerus. Hubungan NPF dan CAR adalah negatif.

BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) pada penelitian Yuliyani (2015) menyatakan bahwa BOPO berpengaruh positif terhadap CAR. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Wilara serta Basuki (2016) yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap CAR. Apabila rasio BOPO rendah, artinya kinerja manajemen bank semakin baik. Sebaliknya, semakin tinggi rasio BOPO, semakin menurun pula kinerja manajemen bank tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BPRS akan mengalami kerentanan apabila rasio BOPO meningkat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul tentang **“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kerentanan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Periode Pasca Krisis 2008 di Indonesia (2012 - Oktober 2018)”**

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, untuk memfokuskan penelitian penulis pada permasalahan yang akan diteliti, maka penulis memberi batasan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Menganalisa pengaruh variable-variabel yang telah ditentukan yaitu ROA, FDR, NPF, dan BOPO terhadap Kerentanan BPRS. Dalam hal ini kerentanan BPRS dilihat dari segi CAR.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di Indonesia.
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada periode Januari 2012 sampai dengan Oktober 2018.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka di dalam penelitian akan diajukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Return on Asset* (ROA) terhadap CAR pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia tahun 2012 – Oktober 2018?
2. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap CAR pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia tahun 2012 - Oktober 2018?
3. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap CAR pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia tahun 2012 - Oktober 2018?

4. Bagaimana pengaruh Biaya Pendapatan dibagi Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap CAR Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia tahun 2012 - Oktober 2018?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Return on Asset* (ROA) terhadap CAR pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia tahun 2012 - Oktober 2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap CAR pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia tahun 2012 - Oktober 2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap CAR pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia tahun 2012 - Oktober 2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh Biaya Pendapatan dibagi Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap CAR Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia tahun 2012 - Oktober.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diberbagai aspek, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang dunia perbankan khususnya pada BPRS bagi penulis dan juga bagi pembaca.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi maupun wawasan keilmuan yang dapat mendukung kegiatan akademisi.
3. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perbankan terutama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) agar dapat lebih memahami mengenai faktor yang mempengaruhi Kerentanan BPRS sehingga mampu bersaing dengan perbankan syariah maupun perbankan konvensional.

